



AGROSTANDAR



# LAPORAN TAHUNAN 2023

**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN ANEKA UMBI**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023

# **LAPORAN TAHUNAN 2023**

## **LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI**



### **PENYUNTING**

**SARJONI, MP.**

**MANSUR, SP., M.Si.**

**EMA KOMALASARI, SP.,MP.**

**ASMARY MUIS, SP., M.Sc.**

**MUH. MUTAHAJID ALMANAR M.,A.Md.**

**WAHYU TRIADI KAMARUDDIN, A.Md.**

**YUNIAR Y. A.Md.**

**YUSRAN ARIFIN**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Tahunan Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi (LPSI Tanaman Aneka Umbi) Tahun 2023 telah disusun. Secara umum, LPSI Tanaman Aneka Umbi berhasil mencapai target yang direncanakan untuk tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Capaian kinerja yang berhasil direalisasikan yaitu: 1). 202.000 unit produk tanaman pangan terstandar; 2). 1 (satu) Usulan PNPS Tanaman Pangan; 3). Nilai Kinerja Anggaran LPSI Tanaman Aneka Umbi 82,40; 4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan 88,25; 5). Tersebarluaskannya hasil standardisasi instrumen tanaman aneka umbi melalui 2 (dua) paket kegiatan penyebarluasan dengan peserta sebanyak 60 Orang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja melaksanakan semua kegiatan baik teknis maupun manajemen, sehingga target LPSI Tanaman Aneka Umbi pada tahun 2023 dapat tercapai. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam rangka pengelolaan standardisasi pertanian serta peningkatan produksi tanaman Aneka Umbi.

Lanrang, Januari 2024  
Kepala Loka

Sarjoni, MP.  
NIP. 197903132009121001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA .....	4
BAB III. KEGIATAN STRATEGIS.....	10
BAB IV. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN .....	18
BAB V. PENUTUP .....	28

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Capaian indikator kinerja utama jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan TA. 2023 .....	5
Tabel 2.2. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dan 2023 .....	7
Tabel 2.3. Perbandingan Nilai ZI Tahun 2022 dan 2023 .....	8
Tabel 3.1. Produksi benih (stek) aneka umbi LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2023 .....	16
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai LPSI Aneka Umbi Tahun 2023 .....	19
Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan ASN LPSI Aneka Umbi Tahun 2023 .....	20
Tabel 4.3. Data Jumlah Pegawai LPSI Tanaman Aneka Umbi .....	20
Tabel 4.4. Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023 .....	21

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.	Grafik nilai SMART TA 2023 ..... 6
Gambar 2.2.	Hasil Penilaian Akhir ZI Tahun 2023 Lingkup PSITP ..... 8
Gambar 3.1.	Identifikasi pengguna standar di Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ..... 11
Gambar 3.2.	Identifikasi kebutuhan standar di PT Nutrindo Bogarasa – Mayora Group ..... 11
Gambar 3.3.	Rapat penyempurnaan PNPS ..... 11
Gambar 3.4.	Surat keputusan Kepala BSN tentang PNPS ..... 12
Gambar 3.5.	Survey dan koordinasi kegiatan penyebarluasan di Kab. Gowa ..... 13
Gambar 3.6.	Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan di Kab. Gowa ..... 14
Gambar 3.7.	Survey dan koordinasi kegiatan penyebarluasan di Kab. Bone ..... 14
Gambar 3.8.	Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan di Kab. Bone ..... 15
Gambar 3.9.	Kegiatan produksi benih aneka umbi ..... 16
Gambar 4.1.	Grafik nilai SMART TA 2023 ..... 18
Gambar 4.2.	Dashboard e-Monev Bappenas TA 2023 ..... 18
Gambar 4.3.	Dashboard e-monitoring BSIP TA 2023 ..... 19
Gambar 4.4.	Studi Tiru Petani Desa Bonto Salama Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai ..... 24
Gambar 4.5.	Kegiatan FGD ubi kayu ..... 25
Gambar 4.6.	Kunjungan mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo ..... 25
Gambar 4.7.	Kegiatan Public Hearing LPSI Tanaman Aneka Umbi ..... 26
Gambar 4.8.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 ..... 27

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian merupakan rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, meringankan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya fasilitasi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis, sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkup pembangunan pertanian sangat luas karena tidak hanya menyangkut produksi komoditas pertanian, tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain, seperti ketahanan pangan, pengembangan agribisnis di perdesaan, sistem jaminan mutu, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia diantaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penguasaan terhadap pasar pertanian baik domestik maupun global tentu menjadi keharusan jika tidak ingin ditinggalkan dalam percaturan dunia global. Untuk menguasai pasar tentunya tidak lepas dari peran strategi standarisasi dalam segala bidang termasuk pertanian. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Untuk melaksanakan peraturan tersebut diterbitkanlah peraturan tentang Sistem

Standardisasi dan Penilaian kesesuaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018.

Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Penerapan standardisasi pada komoditas pertanian dapat mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing suatu produk. Dalam rangka memenuhi standar komoditas tanaman pangan diperlukan program penyusunan standardisasi yang memperoleh keberterimaan yang luas. LPSI Tanaman Aneka Umbi yang berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada kepala BSIP dengan pembinaan teknis oleh Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi. Sesuai dengan mandatnya LPSI Tanaman Aneka Umbi Menyusun rencana kegiatan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi dalam hal ini menyiapkan bahan perumusan usulan Program Nasional Perumusan Standard (PNPS) komoditas aneka umbi mendukung PNPS tanaman pangan, melakukan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar, pengelolaan produk hasil standarisasi tanaman aneka umbi, serta menyebarluaskan hasil standarisasi instrumen tanaman pangan.

## **1.2. Tujuan**

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- 2) Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- 3) Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi tanaman aneka umbi;
- 4) Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumentanaman aneka umbi;
- 5) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standarisasi instrumen tanaman aneka umbi;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LPSI Tanaman Aneka Umbi.



### **1.3. Sasaran**

- 1) Meningkatnya produk instrumen tanaman pangan terstandar;
- 2) Meningkatnya pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman;
- 3) Tersebarluaskannya hasil standarisasi instrumen tanaman aneka umbi;
- 4) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima;
- 5) Terkelolanya anggaran Loka pengujian standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi yang akuntabel dan berkualitas.

### **1.4. Keluaran**

- 1) 200.000 unit produk tanaman pangan terstandar;
- 2) 1 (satu) Perumusan Usulan PNPS Tanaman Pangan;
- 3) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan 80;
- 4) Nilai Kinerja Anggaran LPSI Tanaman Aneka Umbi 80.

## **BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, LPSI Tanaman Aneka Umbi melakukan penyusunan berbagai kebijakan teknis yang terkait dengan peningkatan kualitas dalam perumusan standar, penyebarluasan hasil standar, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian tanaman aneka umbi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan kinerja yang berbasis elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Pertanian, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah disusun berbagai program yang berkaitan dengan standar instrumen tanaman aneka umbi yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat dan dampak melalui keluaran yang terukur dan tepat sasaran. Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan program standar instrumen tanaman aneka umbi tersebut dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis. Sesuai dengan Permentan nomor 45 tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementan bahwa tingkat kinerja suatu organisasi perlu dikelola dengan baik agar dapat terukur tingkat keberhasilannya.

Melalui pengelolaan kinerja organisasi, diharapkan penyusunan perencanaan kinerja dapat dilakukan dengan baik sebagai persiapan bagi organisasi dalam menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya organisasi menyusun dan mengukur capaian kinerjanya dibandingkan dengan rencana atautarget yang telah ditetapkan. Bagian ini merupakan hasil akhir dari mekanisme monitoring dan evaluasi dan menuju pada penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban LPSI Tanaman Aneka Umbi dalam pemanfaatan anggaran kepada negara.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan melalui pelaporan darimasing-masing penanggung jawab kegiatan serta memantauan langsung ketikadiperlukan. Realisasi keuangan dipantau melalui aplikasi SAKTI, serta penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melalui e-monev SMART DJA, pelaporan e- Monev Bappenas, e-Sakip Kementan, dan SPAN setiap bulan.

LPSI Tanaman Aneka Umbi berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memonitor dan mengevaluasi menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (output) serta manfaat (outcome). Metode yang

digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran kinerja. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, dan misi LPSI Tanaman Aneka Umbi. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan LPSI Tanaman Aneka Umbi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

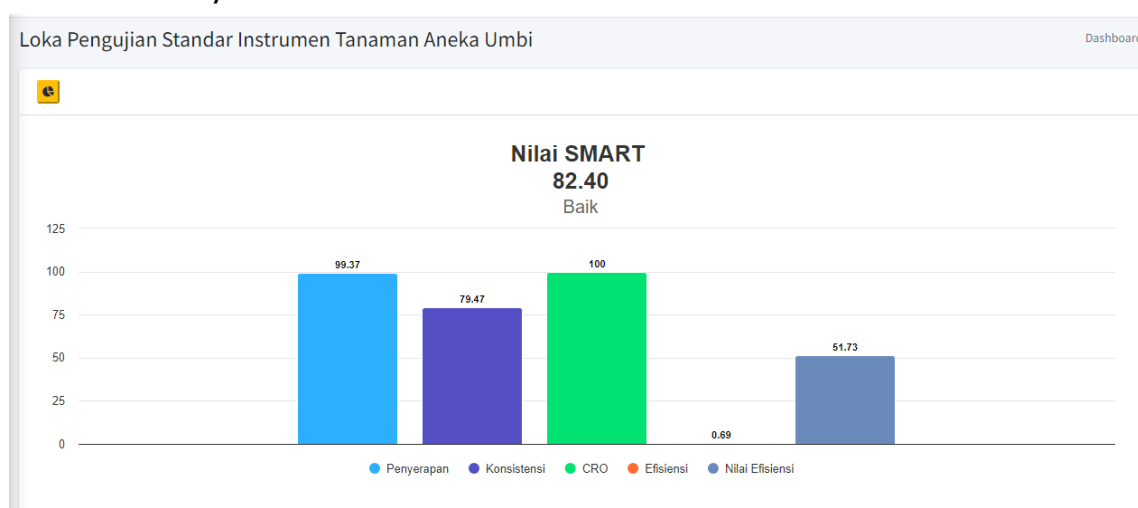
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Secara umum akuntabilitas kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi sampai dengan Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Capaian indikator kinerja utama jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan TA. 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Persentase
		Uraian	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	1-1 Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	200.000 Unit	202.000	101%
2	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	2-1 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	80 Nilai	82,40	103%
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	3-1 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	80 Nilai	88,25	110,31%

Capaian indikator kinerja jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 202.000 unit dari target 200.000 unit dengan persentase 101%. Capaian tersebut terdiri dari jumlah stek ubi kayu sebanyak 50.000 unit dan stek ubi jalar 152.000 unit.

Nilai kinerja anggaran LPSI Aneka Umbi tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Fungsi monitoring dan evaluasi kinerja yaitu sebagai pembuktian dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola LPSI Tanaman Aneka Umbi untuk menunjukkan akuntabilitas dan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.



**Gambar 2.1. Grafik nilai SMART TA 2023**

Capaian nilai kinerja anggaran LPSI Aneka yaitu 82,40 dari target 80,00 atau 103%. Secara umum nilai tersebut merupakan hasil penilaian dari penyerapan, konsistensi, capaian rincian output, efisiensi, dan nilai efisiensi. Capaian output kegiatan yang tercapai antara lain produksi benih aneka umbi, draft standar, serta output kegiatan manajemen.

Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran, terjadi penurunan nilai SMART yang diperoleh yaitu 82,40 dari tahun sebelumnya 85,82. Salah satu penyebabnya yaitu pada awal tahun kegiatan terdapat alokasi anggaran yang diblokir menghalangi realisasi anggaran dan pemenuhan waktu capaian output yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.2. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	80,00	85,82	80,00	88,25

LPSI Tanaman Aneka Umbi selaku salah satu instansi pemerintah melakukan penilaian terhadap capaian Zona Integritas (ZI). ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.

Nilai pembangunan ZI diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana ZI pada setiap satker yang kemudian dilakukan penilaian mandiri dan dievaluasi oleh tim penilai. Tim penilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2023 yaitu Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) yang ditunjuk oleh BSIP. Realisasi nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi yaitu 88,25 dengan target nilai 80,00 sehingga diperoleh capaian sebesar 110,31%. Nilai ZI ini merupakan akumulasi dari setiap komponen penilaian Pengungkit dan Hasil. Nilai Pengungkit meliputi Pemenuhan dan Reform yang keduanya terdiri dari 6 (enam) aspek antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen hasil terdiri dari Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, serta Pelayanan Publik yang Prima.



**RINCIAN NILAI ZONA INTEGRITAS TIM 1**

Penilaian	Bobot	BSIP TP	BSIP Padi	BSIP Serealia	BSIP Kacang	BSIP Umbi
<b>A. PENGUNGKIT</b>	<b>60.00</b>	<b>56.57</b>	<b>52.93</b>	<b>45.71</b>	<b>52.86</b>	<b>56.07</b>
<b>I. PEMENUHAN</b>	<b>30.00</b>	<b>28.31</b>	<b>26.50</b>	<b>24.39</b>	<b>26.54</b>	<b>26.40</b>
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	4.00	3.11	3.24	3.63	3.89
2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	3.31	2.81	2.68	2.31	2.75
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	4.68	4.51	4.44	4.58	5.00
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	5.00	5.00	3.74	5.00	5.00
5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	7.13	6.31	6.38	6.56	6.34
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	4.20	4.75	3.92	4.46	3.42
<b>II. REFORM</b>	<b>30.00</b>	<b>28.26</b>	<b>26.43</b>	<b>21.32</b>	<b>26.32</b>	<b>29.67</b>
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	4.00	4.00	3.42	2.75	3.67
2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	3.33	3.00	2.84	3.00	3.50
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	4.25	4.29	2.58	4.26	5.00
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	5.00	4.51	4.51	5.00	5.00
5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	7.50	6.88	4.21	7.17	7.50
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	4.18	3.76	3.76	4.15	5.00
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>	<b>56.57</b>	<b>52.93</b>	<b>45.71</b>	<b>52.86</b>	<b>55.07</b>	

**RINCIAN NILAI ZONA INTEGRITAS TIM 1 (lanjutan)**

Penilaian	Bobot	BSIP TP	BSIP Padi	BSIP Serealia	BSIP Kacang	BSIP Umbi
<b>B. HASIL</b>	<b>40.00</b>	<b>33.02</b>	<b>32.36</b>	<b>33.11</b>	<b>34.03</b>	<b>32.19</b>
<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22.50</b>	<b>16.88</b>	<b>16.88</b>	<b>16.88</b>	<b>16.88</b>	<b>16.88</b>
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17.50</b>	<b>16.14</b>	<b>15.49</b>	<b>16.23</b>	<b>17.15</b>	<b>15.31</b>
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50	16.14	15.49	16.23	17.15	15.31
<b>TOTAL HASIL</b>	<b>33.02</b>	<b>32.36</b>	<b>33.11</b>	<b>34.03</b>	<b>32.19</b>	
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>89.59</b>	<b>85.29</b>	<b>78.82</b>	<b>86.88</b>	<b>88.25</b>	

**Gambar 2.2. Hasil Penilaian Akhir ZI Tahun 2023 Lingkup PSITP**

Capaian realisasi nilai zona integritas (ZI) tahun 2023 sebesar 88,25 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 85,82 atau kenaikan 2,43. Nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tertera pada tabel berikut.

**Tabel 2.3. Perbandingan Nilai ZI Tahun 2022 dan 2023**

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	80,00	85,82	80,00	88,25

Nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2022) di setiap aspek penilaian pada komponen pengungkit. Hal ini terjadi karena LPSI Tanaman Aneka Umbi telah mengupayakan syarat-syarat yang menjadi perhatian dalam pembangunan ZI, terutama pada aspek yang belum mencapai target berdasarkan penilaian Zona Integritas tahun 2022. Adapun aspek yang mengalami peningkatan antara lain:

- Nilai reform pada area Manajemen Perubahan. Jumlah perubahan yang dilakukan pada tahun 2023 sesuai dengan jumlah agen perubahan yang telah ditetapkan oleh pimpinan UPT.
- Nilai reform pada area Penataan Tatalaksana. Telah dilakukan transformasi digital yang mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.
- Nilai reform pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Seluruh hasil *assessment* telah dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai dimana pada tahun sebelumnya hasil *assessment* belum seluruhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.

- d. Nilai reform pada area Penguatan Pengawasan, telah dilakukan realisasi tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan masyarakat yang diterima.
- e. Nilai pemenuhan pada area Kualitas Pelayanan Publik juga mengalami peningkatan untuk nilai pengungkit. Eeviu dan perbaikan atas standar pelayanan bukan hanya dilakukan berdasarkan hasil SKM dan Pengaduan Masyarakat seperti yang telah dilakukan pada tahun 2022 namun juga telah dilakukan reviu dan perbaikan dengan melibatkan stakeholder (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat) melalui kegiatan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik (SPP) tahun 2023.

Nilai reform pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik juga mengalami peningkatan dikarenakan upaya dan/atau inovasi pelayanan publik yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih cepat dan mudah), serta pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media.

## **BAB III. KEGIATAN STRATEGIS**

### **3.1. Perumusan Usulan PNPS Tanaman Ubi**

Dalam rangka memenuhi standar komoditas tanaman pangan diperlukan program penyusunan standardisasi yang dapat diterima secara luas. LPSI Tanaman Aneka Ubi menyiapkan bahan perumusan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) komoditas tanaman ubi mendukung PNPS tanaman pangan. Program perumusan usulan PNPS bertujuan untuk merumuskan dokumen PNPS loka pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi dengan keluaran berupa 1 (satu) draft PNPS.

Rapat rutin PNPS dilaksanakan setiap bulan untuk membahas progress penyusunan PNPS dan melakukan perbaikan sesuai dengan data pendukung yang diperoleh baik melalui studi literatur, SNI terkait, dan hasil koordinasi dengan stakeholder di lapangan. Tahap awal yakni penentuan tema standar yang akan diusulkan melalui rapat tim PNPS. Hasil kesepakatan dan berdasarkan kajian pustaka, dirumuskan tema yang akan dibahas mengenai perbenihan tanaman aneka umbi. Komoditas yang menjadi prioritas adalah ubi kayu. Hasil penelusuran dan identifikasi belum terdapat dokumen standar berupa SNI untuk benih ubi kayu.

Untuk mendukung penyusunan draft PNPS, dilakukan konsultasi dengan tim Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kantor Layanan Teknis (KLT) Sulawesi Selatan di Makassar mengenai tata cara penyusunan draft PNPS. Salah satu program untuk meningkatkan kapasitas SDM terutama mengenai dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu pelatihan penyusunan dokumen standar dengan pemateri dari BSN KLT Sulsel. Output yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu peningkatan pengetahuan khususnya bagi tim konseptor PNPS mengenai substansi dan tata naskah penulisan RSNI.

Tahapan berikutnya disusun rancangan draft PNPS. Dalam penyusunannya, mengacu pada regulasi yang berlaku diantaranya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. Untuk menambah data pendukung, dilakukan identifikasi pengguna standar di lapangan serta koordinasi dengan stakeholder di Kab. Barru, Kab. Gowa, dan Kab. Bone. Stakeholder antara lain Dinas Pertanian, BPP, Kelompok Tani, Petani, Industri, dan UMKM. Tujuannya untuk mengumpulkan data pendukung kebutuhan standar di lapangan.





**Gambar 3.1. Identifikasi pengguna standar di Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru**



**Gambar 3.2. Identifikasi kebutuhan standar di PT Nutrindo Bogarasa – Mayora Group**

Tahapan berikutnya yaitu koordinasi dan penyempurnaan PNPS Produksi benih ubi kayu dengan menghadirkan stakeholder antara lain BSN, Dinas Pertanian Propinsi Sulsel, PT Nutrindo Bogarasa Div. Tapioka – Mayora Group, petani ubi kayu, tim PSI Tanaman Pangan. Diperoleh berbagai masukan dan evaluasi isi draft dari para narasumber dan pembahas untuk ditindaklanjuti oleh konseptor. Draft PNPS telah mendapatkan umpan balik positif dari para pemangku kepentingan. Formulir pengusulan pada sispk BSN telah diisi dengan melampirkan draft pada bulan Oktober 2023.



**Gambar 3.3. Rapat penyempurnaan PNPS**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia, telah ditetapkan PNPS Produksi benih ubi kayu yang telah diusulkan pada Tahun 2023.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 2/KEP/BSN/1/2024  
TENTANG  
PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2024  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

- Menimbang a. bahwa untuk mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia yang dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional mengenai Pengembangan Standar Nasional Indonesia, perlu disusun Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia Tahun 2024.
- Meningat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

No	Komite Teknis	Judul
305	11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	Sterilisasi produk pelayanan kesehatan – Indikator biologi - Bagian 2: Indikator biologi untuk proses sterilisasi dengan etilena oksida
306	65-02 Hasil Hutan Bukan Kayu	Madu
307	03-05 Lembaga Penilaian Kesesuaian	Penilaian kesesuaian – Contoh skema sertifikasi produk berwujud
308	11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	Sterilisasi produk kesehatan - Indikator biologi - Bagian 1: Persyaratan umum
309	65-11 Tanaman Pangan	Beras - Penentuan karakteristik biometrik butir beras
310	11-10 Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan	Alat kesehatan – Pengawasan pasca pasar untuk pabrikasi
311	79-01 Hasil Hutan Kayu	Kayu lapis - Klasifikasi
312	65-11 Tanaman Pangan	Benih Jagung Bersari Bebas
313	65-17 Pakan Ternak	Tepung daging dan tulang (meat and bone meal/MBM) - Bahan pakan ternak
314	79-01 Hasil Hutan Kayu	Kayu ringan – Bagian 4: Venir lamina
315	65-11 Tanaman Pangan	Produksi benih Ubi Kayu
316	37-01 Teknologi Grafika	Teknologi grafika – Opasitas visual dari tinta putih yang dicetak
317	37-01 Teknologi Grafika	Teknologi grafika – Format file untuk kontrol kualitas dan metadata Bagian 2: Kualitas Cetak eXchange (PQX)

### Gambar 3.4. Surat keputusan Kepala BSN tentang PNPS

Selain komoditas ubi kayu, tim PNPS juga menyiapkan bahan untuk bahan penyusunan produksi benih porang; mengumpulkan data/bahan penyusun standar serta identifikasi standar ubi kayu untuk industri; dan identifikasi bahan standar ubi jalar; Tujuannya yaitu mengumpulkan data pendukung kebutuhan standar di lapangan yang akan diajukan di tahun 2024.

### 3.2. Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Ubi

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagai badan baru yang bertransformasi dari Badan Litbang Pertanian, memiliki tugas dan fungsinya salah satunya melakukan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman aneka umbi. Penyebarluasan yang dilakukan BSIP pada pelaku usaha tani dimaksudkan untuk memberikan informasi adanya standardisasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan daya saing hasil pertanian.

Kegiatan bertujuan untuk menyebarluaskan hasil standardisasi tanaman aneka umbi di Sulawesi Selatan. Keluaran yang diharapkan pada kegiatan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman ubi yakni Tersebarluaskannya hasil standardisasi instrumen tanaman aneka umbi melalui 2 (dua) paket kegiatan penyebarluasan. Adapun rangkaian dari kegiatan penyebarluasan dimulai dari survey lokasi, koordinasi dan persiapan kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan penyebarluasan.

### 3.2.1 Penyebarluasan hasil standardisasi tanaman aneka umbi di Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan penghasil ubi kayu terbesar di Sulawesi Selatan selain Takalar dan Jeneponto. Menurut dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kab. Gowa terdapat tiga kecamatan penghasil singkong yaitu kec. Patalasang, Parangloe, dan Botolempangan.



**Gambar 3.5. Survey dan koordinasi kegiatan penyebarluasan di Kab. Gowa**

Hasil Standardisasi SNI 9126:2022 ubi kayu disebarluaskan kepada 30 orang petani ubi kayu yang berdomisili dari kecamatan Bontobonto. Bertempat di aula BPP Bontobonto, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan tema Standardisasi Hasil Pertanian untuk Meningkatkan Daya Saing. Petani sebagai pelaku usaha budidaya ubi kayu dapat menerapkan standar ubi kayu untuk memperluas pasar hasil pertanian. Materi standardisasi disampaikan oleh Ahmad Hawari Assufi, S. Si, Kepala kantor Layanan Teknis Badan Standardisasi Nasional (BSN) Sulawesi Selatan. Materi yang disampaikan meliputi tugas dan fungsi BSN, pengertian SNI, kewajiban SNI dalam penerapannya, alur SNI, klasifikasi, syarat mutu umum dan khusus, penandaan, tahapan penerapan SNI, alur sertifikasi produk, dan laboratorium pengujian terakreditasi KAN.

Selain materi standardisasi, peserta juga mendapatkan materi Budidaya Ubi kayu untuk Standardisasi Hasil Produk Pertanian dan Arah Kebijakan Pemerintah Kab. Gowa. Materi ini disampaikan oleh Kabid. Tanaman Pangan Dinas TPH kab. Gowa Nurlyah Djamir, S.Pi. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan pentingnya ubi kayu dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Salah satu alasan penting yaitu karena selain berperan dalam pemenuhan kebutuhan sumber karbohidrat untuk substitusi beras, juga untuk diversifikasi pangan.





**Gambar 3.6. Pelaksanaan kegiatan penyebaran di Kab. Gowa**

Pada sesi diskusi, peserta antusias menyampaikan pertanyaan dan masukan berkaitan dengan kegiatan standarisasi dan upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan aneka umbi selaku pendukung dalam menopang ketahanan pangan nasional. Petani juga menyampaikan kebutuhan akan standar dalam budidaya serta bibit ubi kayu. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi menyatakan siap mengakomodir kebutuhan petani, dan saat ini sedang dilakukan penyusunan standar benih ubi kayu dalam bentuk usulan Program Nasional Perumusan Standard (PNPS).

### **3.2.2 Penyebarluasan hasil standarisasi tanaman aneka umbi di Kabupaten Bone**

Ubi jalar merupakan salah satu komoditas yang cukup diminati petani untuk ditanam dan dikembangkan di kabupaten Bone. Tanah yang sesuai dan cocok serta pengelolaan yang terbilang mudah menjadi alasan dalam memilih komoditas ini menjadi tanaman sela pada musim kering. Selain itu, harga yang menjanjikan juga menjadi alasan petani dalam membudidayakannya. Terdapat dua kecamatan yang menjadi sumber utama penghasil ubi jalar yaitu kecamatan Bengo dan Awangpone.



**Gambar 3.7. Survey dan koordinasi kegiatan penyebaran di Kab. Bone**

Hasil standarisasi SNI 01-4493-1998 Ubi Jalar didesiminasikan di BPP Awangpone pada tanggal 10 Agustus 2023 dan dihadiri oleh 30 orang petani ubi jalar. Pemaparan materi standar disampaikan oleh Badan Standardisasi Nasional

(BSN) Kantor Layanan Teknis Makassar, Ariyanto Hernowo, ST, mencakup pengertian SNI, kewajiban SNI dalam penerapannya, alur SNI, ruang lingkup SNI 01-4493-1998 Ubi Jalar, klasifikasi, keseragaman ubi jalar, syarat mutu umum dan khusus, cara pengambilan contoh, penandaan, tahapan penerapan SNI, Alur sertifikasi produk, dan laboratorium pengujian terakreditasi KAN.

Selain itu, disampaikan materi Budidaya Ubi Jalar untuk standardisasi hasil produk pertanian oleh Akademisi Universitas Hasanuddin, Prof. DR. IR. Elkawakib Syam'un, MP. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan potensi ubi jalar, manfaat ubi jalar, sentra penanaman di Sulawesi Selatan, Peluang agribisnis, deskripsi varietas, Teknik budidaya, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen.



**Gambar 3.8. Pelaksanaan kegiatan penyebaran di Kab. Bone**

Pada sesi diskusi, peserta antusias mengajukan pertanyaan mengenai Teknik budidaya seperti pemupukan efektif yang dapat dilakukan dan pengendalian hama penyakit untuk ubi jalar. Selain itu peserta memberikan masukan berkaitan dengan kegiatan standardisasi dan upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan aneka umbi selaku pendukung dalam menopang ketahanan pangan nasional.

### **3.3. Produksi Benih Aneka Umbi**

Capaian indikator kinerja jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah terealisasi sebesar 202.000 unit dari target 200.000 unit dengan persentase 101%. Capaian tersebut terdiri dari jumlah stek ubi kayu sebanyak 50.000 unit dan stek ubi jalar 152.000 unit. Kelas benih yang dihasilkan adalah benih penjenis. Produk pertanian standar yang dihasilkan dengan rincian terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Produksi benih (stek) aneka umbi LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2023

Komoditas	Varietas	Produksi (unit)
Ubi Kayu	Malang 4	50.000
Ubi Jalar	Beta 1	5.500
	Beta 2	20.000
	Beta 3	2.250
	Antin 1	15.500
	Antin 2	16.000
	Antin 3	31.000
	Pating 1	6.000
	Pating 2	1.750
	Papua Salossa	25.000
	Sawentar	9.000
	Kidal	9.000
	Sari	11.000
	<b>Jumlah</b>	

LPSI Tanaman Aneka Umbi mendapat mandat untuk menghasilkan produk pertanian standar berupa benih tanaman aneka umbi tahun 2023, oleh karena ketersediaan bahan komoditi tersebut masih berada di BPSI Tanaman Aneka Kacang di Malang Jawa Timur maka kegiatan produksi benih tanaman umbi dilakukan di BPSI Tanaman Aneka Kacang dengan menempatkan satu SDM untuk mengawal kegiatan sekaligus mengikuti training produksi benih sebagai bentuk efisiensi sumber daya. Capaian produk pertanian standar berupa benih tanaman aneka umbi tahun 2023 yang dilaksanakan dengan kerjasama LPSI Tanaman Aneka Umbi dengan IP2SIP Kendalpayak dan IP2SIP Jambegede Malang Jawa Timur. Kegiatan perbenihan berjalan dengan baik karena dukungan pengawalan oleh tim LPSI Tanaman Aneka Umbi bersama dengan bekerjasama dengan BPSI Tanaman Aneka Kacang. Dukungan lokasi produksi merupakan sentra pengembangan ubi kayu dan ubi jalar sehingga kesesuaian agroekosistem untuk kedua komoditi sangat mendukung.



Gambar 3.9. Kegiatan produksi benih aneka umbi

Selama tahun berjalan hasil produksi benih aneka umbi berupa stek ubi kayu dan ubi jalar telah tersebar ke beberapa daerah. Benih ubi kayu terdistribusi ke UPT PBTPH Dinas Tanaman Pangan Palu Sulawesi Tengah, BBI Palawija Besum, Jayapura, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bener Meriah Aceh, dan Bontobili Gowa Sulawesi Selatan yaitu Varietas Malang 4 sebanyak 50.000 stek. Benih ubi jalar terdistribusi ke BPSIP Kalimantan Timur (Varietas Beta 1 sebanyak 20.000 stek, Beta 3 sebanyak 750 stek, Antin 2 sebanyak 3.600 stek, Antin 3 sebanyak 2.250 stek), ke Desa Salak 1 Kec. Salak Kab. Pakpak Baharat Sumatera Utara (Varietas Beta 2 sebanyak 5.000 stek), ke Dinas Pertanian Trenggalek Jawa Timur (Varietas Antin 2).

### **3.4. Laboratorium Pengujian Mutu Benih**

Kegiatan Laboratorium Pengujian Mutu Benih di Tahun 2023 berupa persiapan pengujian dengan belanja berbagai macam alat dan bahan pendukung Laboratorium.

### **3.5. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

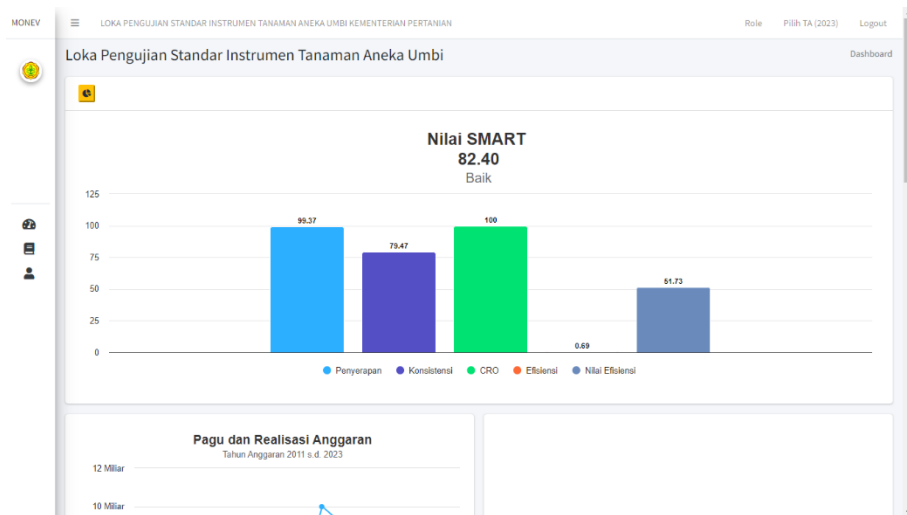
Belanja Modal yang diatur oleh DJP Keuangan memberikan pengertian ialah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Pada tahun 2023 LPSI Tanaman Aneka Umbi melakukan pembelian pembelian 2 (dua) unit motor tiga roda.

## BAB IV. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

### 4.1. Laporan Aplikasi Monev

#### - Aplikasi SMART

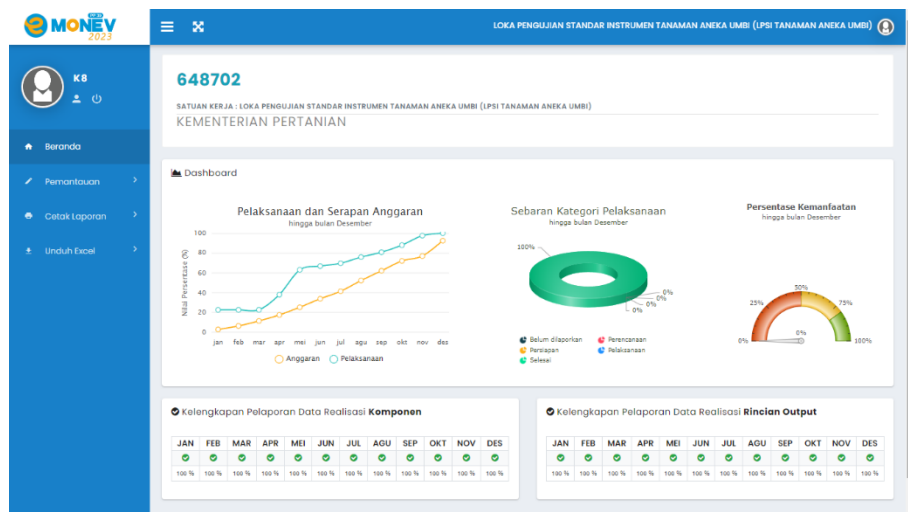
Berdasarkan penilaian Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) nilai LPSI Tanaman Aneka Umbi sebesar 82,40 dengan rincian nilai penyerapan 99,37, nilai konsistensi 79,47, nilai CRO 100, efisiensi 0,69 dan nilai efisiensi 51,73 sehingga termasuk dalam kategori Baik.



Gambar 4.1. Grafik nilai SMART TA 2023

#### - Aplikasi e-Monev Bappenas

LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melakukan pengisian aplikasi e-Monev Bappenas selama tahun 2023. Pelaksanaan dan serapan anggaran mencapai 100%.

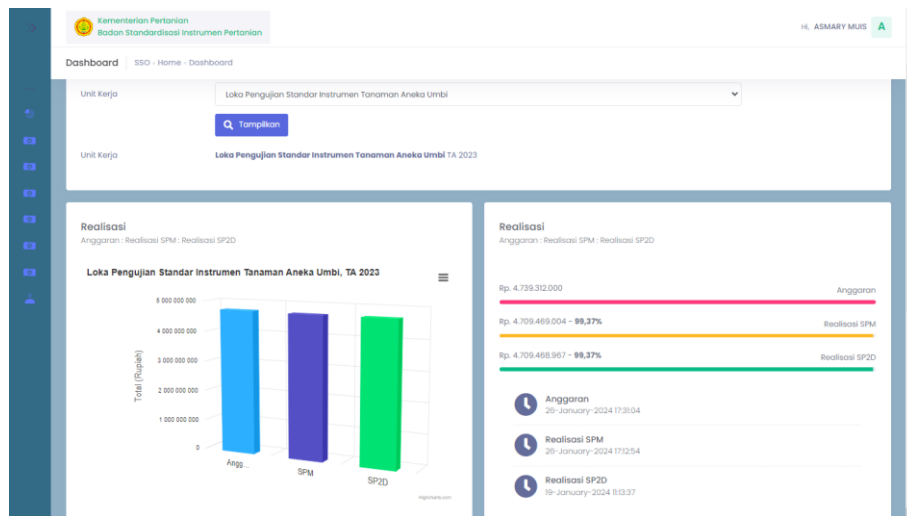


Gambar 4.2 Dashboard e-Monev Bappenas TA 2023



- **Aplikasi e-monitoring BSIP**

LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melakukan pengisian aplikasi e-monitoring BSIP selama tahun 2023. Realisasi SPM dan SP2D untuk belanja pegawai Rp. 1.049.292.613,-, belanja barang Rp. 3.591.037.391,- serta belanja modal Rp. 69.139.000,- dengan total pesentase sebesar 99,37%.



**Gambar 4.3. Dashboard e-monitoring BSIP TA 2023**

**4.2. Kegiatan Manajemen**

**4.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan SDM**

Kepala LPSI Aneka Umbi dijabat oleh seorang pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab kepada Kepala PSITP yang berkedudukan di Bogor. Secara teknis Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh pegawai ASN dan PPNPN. Pada awal tahun hingga pertengahan tahun 2023, jumlah total pegawai sebanyak 49 orang terdiri dari 17 PNS dan 32 PPNPN. Pada bulan Oktober mendapatkan mutasi pegawai fungsional pengawas benih tanaman sebanyak 1 orang dari BPSI Sulawesi Tengah sehingga total pegawai per bulan Desember berjumlah 50 orang yang terdiri dari 18 PNS dan 32 PPNPN. Data pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai LPSI Aneka Umbi Tahun 2023

No	Jabatan	Januari – Juni	Juli – Desember
1.	Pejabat Struktural	1	1
2.	Pejabat Fungsional	8	9
3.	Administrasi	5	5
4.	Prakarya Kebun	2	2
5.	Pengelola Laboratorium	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
6.	PPNPN	32	32
	<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>50</b>

Pelaksanaan kegiatan 2023 di LPSI Aneka Umbi, baik teknis maupun administrasi dapat dilaksanakan secara maksimal oleh SDM dengan latar belakang pendidikan ASN yang beragam dari jenjang S2, S1, D3, SMA, SD. Adapun rincian tingkat Pendidikan ASN pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan ASN LPSI Aneka Umbi Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Januari – Juni	Juli – Desember
1	S2	4	5
2	S1	3	3
3	D3	3	3
4	SMA	5	5
5	SD	2	2
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>18</b>

Kemajuan pelaksanaan pengelolaan SDM sampai dengan bulan Desember 2023 yakni pemutakhiran data pegawai. Hingga akhir tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali pemutakhiran data pegawai, sehingga bezzeting pegawai LPSI Tanaman Aneka Umbi secara detail adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3. Data Jumlah Pegawai LPSI Tanaman Aneka Umbi

No	Jabatan	Jumlah (orang)
<b>Jabatan Struktural</b>		
1	Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi	1
<b>Jabatan Pelaksana</b>		
2	Analisis Perbendaharaan	1
3	Pengelola Laboratorium	1
4	Pengelola Data	1
5	Pengadministrasi Keuangan	2
6	Pengadministrasi Umum	2
7	Pekarya Kebun	2
<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>		
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
9	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1
10	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1
11	POPT Ahli Pertama	1
12	POPT Terampil	2
13.	Calon Peneliti Ahli Pertama	1
14.	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	1
<b>Total ASN</b>		<b>18</b>
<b>PPNPN/Tenaga Kontrak</b>		<b>32</b>
<b>Total</b>		<b>50</b>

Pemutakhiran data pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SI-ASN BKN) yakni data pengembangan kompetensi pegawai terdiri dari Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/magang/kursus/dan sejenisnya. Pemutakhiran data pada

aplikasi SIM ASN akan dilakukan secara kontinyu (apabila terbit dokumen kepegawaian terbaru).

Dalam rangka memenuhi kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi, BSIP Aneka Umbi telah mengikutsertakan SDM berdasarkan bidang jabatan dan/atau kebutuhan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Adapun pengembangan kompetensi yang dilaksanakan selama pada Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.4. Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

No	Jenis pengembangan kompetensi	Peserta	Narasumber	Pelaksanaan
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pranataacara/ <i>Master of Ceremony</i>	1. Ema Komalasari, SP.,MP. 2. Yuniar Y., A.Md. 3. Irfa Pratiwi, SP.		30 Maret 2023
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Yuniar Y., A.Md.		Mei 2023
3	Pelatihan Penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	Fungsional PBT Fungsional POPT Pengelola Laboratorium	BSN KLT Makassar	17 – 18 Juli 2023
4	Pengawasan produksi mutu benih ubi kayu dan ubi jalar serta pemeliharaan Sumber Daya Genetik (SDG) di kebun BPSI Tanaman Aneka Kacang Malang	Wahyu Triadi Kamaruddin, A.Md.	BPSI Tanaman Aneka Kacang Malang	Juli – November 2023
5	Bimtek Aturan Kedisiplinan Pegawai	1. Munira, SE. 2. Yuniar Y., A.Md.		
6	Bimtek Wawancara dan Penyusunan BAP Kasus Etika dan Kedisiplinan Pegawai	1. Munira, SE. 2. Yuniar Y., A.Md.		
7	Training Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Berbasis ISO 17025:2017	Fungsional PBT Fungsional POPT Personil Laboratorium	BSN KLT Makassar	16 – 18 Oktober 2023
8	Pelatihan Audit Internal Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 berbasis SNI ISO 9011:2018	1. Muh. Mutahajid Almanar M., A.Md. 2. Yuniar Y., A.Md.	BSN	30 Oktober – 1 November 2023

No	Jenis pengembangan kompetensi	Peserta	Narasumber	Pelaksanaan
9	Pelatihan Produksi Benih Ubi Kayu dan Ubi Jalar	1. Mansur, SP.,M.Si. 2. Ema Komalasari, SP.,MP. 3. Muh. Afif Juradi, SP.,MP. 4. Asmary Muis, SP.,M.Sc.	Kepala IP2SIP Jambegede BPSI Tanaman Aneka Kacang	2 November 2023
10	<i>Training Service Excellence</i>	Seluruh Pegawai LPSI Tanaman Aneka Umbi	Smyle Consulting	14 November 2023
11	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1	1. Muh. Afif Juradi, SP., MP. 2. Wahyu Triadi Kamaruddin, A.Md.	LKPP	20 November – 8 Desember 2023
12	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC)	Asmary Muis, S.P., M.Sc.	BSN	12 – 14 Desember 2023
13	Penugasan pegawai di Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP)	Yudi Suryanto		

#### 4.2.2 Pengelolaan Aset

##### - Realisasi keuangan

Pada tahun 2023 LPSI Tanaman Aneka Umbi menerima anggaran sesuai dengan pagu akhir tahun sebesar Rp. 4.739.312.000. dengan capaian realisasi hingga 31 Desember 2023 yakni Rp. 4.709.469.004 (99,37%). Realisasi PNBPN sampai dengan Desember 2023 berupa penerimaan umum sebesar Rp. 237.500 dari target Rp. 400.000 (59,37%) dan penerimaan fungsional sebesar Rp. 109.420.000 dari target Rp. 409.000.000 (26,75%).

##### - Kebun Percobaan

Kebun Percobaan (KP) mempunyai peran penting kegiatan standardisasi baik pengujian maupun peoduksi benih. KP terdiri atas satu atau beberapa bidang tanah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Penggunaan dan pemanfaatan lahan KP secara umum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Namun demikian, pengelolaan KP perlu perlakuan tersendiri

mengingat komposisi BMN di dalam KP yang spesifik untuk menunjang kegiatan pengujian standardisasi tanaman pangan.

LPSI Tanaman Aneka Umbi memiliki KP yang berlokasi di Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kebun di Lanrang seluas 37 ha dengan agroekosistem sawah tadah hujan, yang digunakan sebagai lokasi kegiatan teknis. LPSI Tanaman aneka umbi juga mendapatkan tambahan aset berupa Kebun IP2SIP Bontobili yang berlokasi di Desa Bili-bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 2 November 2023 telah dilakukan serah terima aset dari BPSI Tanaman Serealisa ke LPSI Tanaman Aneka Umbi disaksikan oleh tim Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP).

Secara fungsi, KP digunakan untuk kegiatan pengujian standardisasi tanaman pangan, konservasi plasma nutfah, produksi benih sumber, *show window* inovasi teknologi. Selibuhnya, KP dimanfaatkan untuk kebun produksi, pendukung ketahanan pangan, dan media pendidikan. Dengan demikian, KP berperan sangat strategis sebagai sarana pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dan sebagai wahana untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### - **Laboratorium**

Laboratorium eksisting mempunyai fungsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang teknologi yang berbasis molekuler bidang pemuliaan tanaman, hama, penyakit, agronomi, perbenihan, dan pasca panen. Jenis laboratorium yang dapat dimanfaatkan laboratorium virologi dengan status belum terakreditasi.

Pada tahun 2023, pengembangan laboratorium mengacu pada tusi satker. Hingga akhir tahun, tahapan persiapan berupa pembelian alat dan bahan pendukung pengujian mutu perbenihan dan persiapan SDM dalam rangka menuju akreditasi laboratorium.

#### - **Rumah negara**

Rumah Negara di LPSI Aneka Umbi sebanyak 5 rumah negara dan dihuni pegawai aktif.

#### - **Kendaraan dinas**

Jumlah kendaraan dinas di LPSI Aneka Umbi jenis roda 2 (1 buah), roda 3 (5 buah), roda 4 (4 buah).

### 4.2.3 Kegiatan Publikasi dan Humas

#### - **Pengelolaan Media Sosial**

Tim Pengelola Website dan Medsos telah melaksanakan kegiatan publikasi melalui media online Website/Medsos. Pengelolaan media sosial online ini dilakukan sebagai sarana penyebarluasan informasi sekaligus pelayanan informasi publik. Selama tahun 2023 total unggahan sebanyak 238 dengan rincian sebagai berikut. Pada bulan Januari sebanyak 10 unggahan, Februari 20 unggahan, Maret 22 unggahan, April 19 unggahan, Mei 32 unggahan, Juni 27 unggahan, Juli 25 unggahan, Agustus 33 unggahan, September 17 unggahan, Oktober 12 unggahan, November 12 unggahan, dan Desember 9 unggahan.

#### - **Kunjungan kelompok tani**

Pada awal tahun 2023, LPSI Tanaman Aneka Umbi menerima kunjungan Gapoktan dari Desa Bonto Salama Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai. Di tengah masa transisi kelembagaan Lolittungro menjadi LPSI Tanaman Aneka Umbi, UPBS menerima kunjungan perwakilan kelompok tani sebanyak 26 orang dengan didampingi oleh Fungsional Kabupaten, Pimpinan BPP, Kepala Desa, Aparat Desa, dan PPL. Kunjungan dalam rangka studi tiru penangkaran benih padi. Hal ini untuk mendukung kegiatan penguatan ketahanan pangan melalui alokasi dana desa (ADD), berupa adopsi inovasiteknologi dalam kegiatan perbenihan. Peserta studi tiru mendapatkan materi mengenai perbenihan padi yang dibawakan oleh Fungsional Pengawas Benih Tanaman.



**Gambar 4.4. Studi Tiru Petani Desa Bonto Salama Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai**

#### - **Focus Group Discussion (FGD)**

FGD "Menggali Potensi dan Pemanfaatan Ubi Kayu di Sulawesi Selatan dalam Konteks Ketahanan Pangan Berkelanjutan" dilaksanakan dalam rangka Sinkronisasi Potensi Pengembangan Ubi Kayu di Sulsel. Kegiatan dihadiri oleh 300 orang peserta berasal dari 5 Kabupaten di Sulsel antara lain Kab. Sidrap, Pinrang, Barru, Soppeng, dan Wajo. Peserta meliputi unsur fungsional kabupaten,

penyuluh pertanian, petani, dan pelaku UMKM ubi kayu. Pemateri yang dihadirkan mewakili pihak Akademisi, Industri Ubi Kayu, dan Pelaku UMKM.



**Gambar 4.5. Kegiatan FGD ubi kayu**

#### - **Kunjungan Mahasiswa**

LPSI Tanaman Aneka Umbi menerima kunjungan Mahasiswa dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo pada Tanggal 13 Juni 2023. Tujuan Kehadiran yakni melakukan kegiatan PKL di LPS Tanaman Aneka Umbi. Sebanyak 13 orang mahasiswa didampingi 1 orang dosen pembimbing.



**Gambar 4.6. Kunjungan mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo**

#### **4.2.4 Pengelolaan PPID dan Dumas**

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan suatu sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara rutin setiap bulannya menyusun laporan PPID kepada Badan standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai Eselon I yang bertugas sebagai PPID Pelaksana di bawah Koordinasi PPID Utama Kementerian Pertanian. Pengaduan Masyarakat (Dumas) adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparaturnya pemerintah terkait, berupa

sumbang pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Seiring dengan transformasi Lembaga yang menyebabkan perubahan pada Tusi satker, maka diperlukan penyusunan SPP dengan ruang lingkup berupa layanan yang akan dilaksanakan di LPSI Tanaman Aneka Umbi. Pada Tahun 2023, telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) LPSI Tanaman Aneka Umbi. Adapun Program pelayanan terdiri dari: (a) Pelayanan Informasi, teknologi; (b) Pelayanan penyediaan benih di Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS); (c) Pelayanan PKL/Magang; dan (d) Layanan Laboratorium.

Selama kurun waktu tahun 2023, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melakukan pelayanan informasi publik dengan baik. Sebanyak total 50 orang terdokumentasi telah terlayani, dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Pemohon layanan informasi publik ini pun cukup beragam, baik itu dari segi usia, profesi, hingga jenis layanan informasi publik yang dibutuhkan. Sedangkan pada layanan Dumas (pengaduan masyarakat) di tahun 2023 ini terdapat 3 (tiga) aduan yang masuk ke LPSI Tanaman Aneka Umbi, dan langsung menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang masuk dengan tuntas dan jelas. L

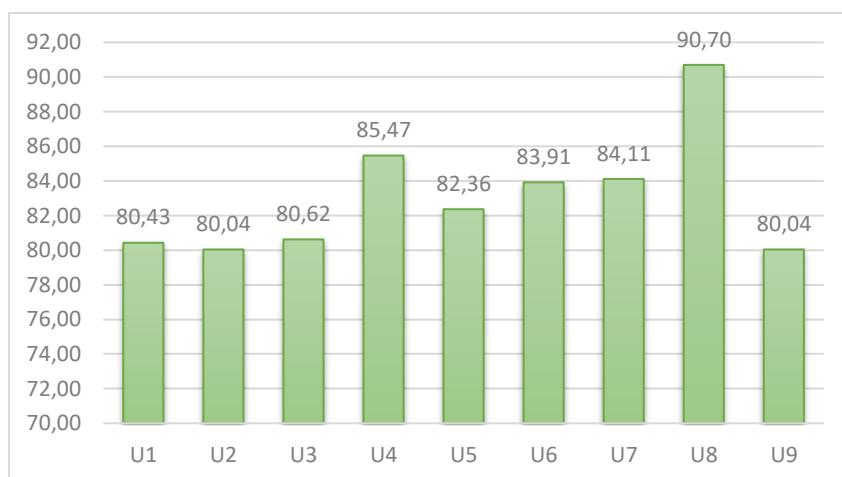
PSI Tanaman Aneka Umbi juga akan terus berupaya melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan penting yang telah dilaksanakan adalah *Public hearing*. *Public hearing* menjadi sarana komunikasi antara pemberi layanan dengan penerima layanan. Acara dihadiri oleh Dinas Pertanian di Sulsel, BPP, polres Sidrap, kelompok tani, penyuluh, dan perguruan tinggi.



**Gambar 4.7. Kegiatan Public Hearing LPSI Tanaman Aneka Umbi**

Kepuasan pengguna layanan menjadi poin penting dalam capaian keberhasilan instansi. Nilai kepuasan masyarakat ini disajikan dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat dimana respondennya merupakan pengguna layanan baik di UPBS, penyebaran, maupun kerjasama.





**Gambar 4.8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023**

Pada gambar diatas disajikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023. Terdapat 9 poin pelayanan antara lain: Kesesuaian persyaratan (U1); Kemudahan prosedur (U2); Kecepatan waktu (U3); Kewajaran tarif (U4); Kesesuaian produk layanan (U5); Kompetensi pelaksana (U6); Perilaku pelaksana (U7); Penanganan pengaduan U8; dan Sarana dan prasarana (U9). Nilai IKM LPSI Tanaman Aneka Umbi adalah 83,07 termasuk dalam kategori sangat baik (81,26 - 100). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LPSI Tanaman Aneka Umbi telah memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Unsur pelayanan tertinggi terdapat dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan, dimana hal ini selaras dengan adanya narahubung yang langsung menangani layanan yang diberikan baik berupa informasi layanan maupun kegiatan magang. Selain itu, pelayanan publik di LPSI Tanaman Aneka Umbi juga tersedia untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan.

## **BAB V. PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Secara umum pelaksanaan kinerja Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi sampai dengan bulan Desember 2023 telah sesuai yang direncanakan dalam penetapan kinerja.

1. Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam PK 2023.
2. Efisiensi kinerja Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi berkaitan dengan pencapaian sasaran tahunan dan pelaksanaan kegiatan strategisnya selama tahun 2023 telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan dengan efektif dan efisien.

### **4.2. SARAN**

Untuk penyempurnaan capaian akuntabilitas kinerja di Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan monitoring berkala untuk percepatan realisasi.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, urgensi, dan prioritas.
3. Penguatan jejaring dengan stakeholder (industri pangan, konsumen, dan Kementerian/Lembaga) baik nasional, maupun regional.
4. Penguatan kegiatan penunjang antara lain: infrastruktur, penerapan quality management system, pemanfaatan teknologi informasi, dan lain- lain.
5. Pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin untuk mendapatkan data dan referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan standar.